

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang paling penting, masyarakat (Orang Pribadi atau Badan) yang terutang wajib membayar pajak kepada negara karena pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan negara dan demi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan aksi nyata dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan negara. Sesuai Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Manfaat pajak bisa dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari hampir disemua sektor seperti fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Penggunaan pajak mulai dari penggunaan anggaran negara, pembangunan sarana umum seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Diharapkan upaya yang dilakukan mampu untuk dijadikan sebagai penggerak pembangunan yang sedang dan akan terjadi.

Pada tanggal 24 Januari 2005 Presiden beserta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan produk *e-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan Surat Pemberitahuan pajak (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*. Pada dasarnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *e-Filing* ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Teknologi *e-Filing* juga sangat memudahkan Petugas Pajak dalam pengelolaan data dari Wajib Pajak karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah

dilakukan secara digital. Dengan teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui fasilitas *e-Filing* ini tidak semudah yang dibayangkan, seperti banyaknya kesulitan yang dialami Wajib Pajak untuk mengakses data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan pajak (SPT) secara elektronik. Sehingga Wajib Pajak yang baru menggunakan *e-Filing* untuk melaporkan Surat Pemberitahuan pajak (SPT) masih merasa kurang nyaman serta merasa kurang efisien terhadap penggunaan *e-Filing* sehingga Wajib Pajak banyak yang lebih memilih untuk tetap datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak guna melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Pada tahun 2015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare merupakan Kantor Pelayanan Pajak dengan Wajib Pajak terdaftar paling banyak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak III dengan jumlah sebanyak 188.742 Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui kelebihan melaporkan Surat Pemberitahuan pajak (SPT) melalui *e-Filing*. Pada tahun 2015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare menerapkan kebijakan kepada para Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan pajak (SPT) melalui sistem *e-Filing*. Sehingga Wajib Pajak

diharapkan terbiasa dan mampu dalam memanfaatkan sistem *e-Filing* secara optimal untuk seterusnya.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dengan mengambil judul “EVALUASI KEBIJAKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE TERHADAP PENGGUNAAN *E-FILING* PADA TAHUN 2016-2018”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini menganalisis tentang EVALUASI KEBIJAKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE TERHADAP PENGGUNAAN *E-FILING* PADA TAHUN 2016-2018. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dalam penerapan *e-Filing*?
2. Seberapa besar target dan realisasi serta efektifitas atas penerapan kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dalam penerapan *e-Filing* pada tahun 2016-2018?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan dalam pembahasan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dalam penerapan *e-Filing* pada tahun 2016-2018.

2. Realisasi dan efektifitas penggunaan *e-Filing* pada tahun 2016 – 2018 atas kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dalam penerapan *e-Filing*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang telah ditetapkan untuk penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare terhadap dalam penerapan *e-Filing*.
2. Untuk mengetahui seberapa besar realisasi penggunaan *e-Filing* atas penerapan kebijakan Kantor Pajak Pratama Pare dalam penerapan *e-Filing* pada tahun 2016 - 2018.

E. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi:
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan penggunaan *e-Filing* pada tahun 2015 - 2018 karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare yaitu upaya peningkatan penggunaan *e-Filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
2. Bagi Penulis:
Menambah pengetahuan bagi penulis terutama mengenai prosedur kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare terhadap penerapan *e-*

Filing serta peningkatan penggunaan *e-Filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada tahun 2015 - 2018.

3. Bagi Pembaca:

Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan tentang bagaimana prosedur kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare terhadap penerapan *e-Filing* serta upaya peningkatan penggunaan *e-Filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada tahun 2015 - 2018.

